KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telepon:(021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755
Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id

KOMISI YUDISIAL
MEMANGGIL

Dalam rangka memberikan kesempatan lebih luas kepada Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Ilmu Hukum yang memiliki pengalaman, keahlian dan komitmen untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Pengembangan Integritas Hakim TA 2022 seluruh Indonesia, kami bermaksud untuk memperpanjang pengumuman "Komisi Yudisial Memanggil" yang didalam rangkaiannya akan melaksanakan Kegiatan Survei Pengukuran Integritas Hakim dan Survei Persepsi Publik terhadap Integritas Hakim secara nasional di 34 Propinsi seluruh Indonesia.

Cakupan Pekerjaan:

A. Cakupan pekerjaan yang akan di lakukan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Survai Pengukuran Integritas Hakim kepada 1200 Hakim di 34 Propinsi seluruh Indonesia
2. Survai Persepsi Publik terhadap Integritas Hakim 2000 Masyarakat dan 400 Pakar (Akademisi dan Praktisi).
3. Rencana Pelaksanaan Survei akan di laksanakan mulai 12 September – 11 Oktober 2022 (30 hari kalender);
4. Pelaksanaan Survei hanya akan di laksanakan oleh 1 (satu) Perguruan tinggi pada tiap Propinsi yang yang nantinya akan dipilih dan di seleksi oleh panitia, kecuali dengan jumlah responden yang lebih dari 150 responden;
5. Propinsi yang akan dilaksanakan Survei antara lain (terlampir) :
   1. Nanggroe Aceh Darussalam,
   2. Sumatera Utara,
   3. Sumatera Barat
   4. Riau,

5. Jambi,
6. Sumatera Selatan,
7. DKI Jakarta,
8. Jawa Tengah 1 & Jawa Tengah 2
9. Jawa Timur 1 & Jawa Timur 2
10. DI Yogyakarta,
11. Kalimantan Barat,
12. Kalimantan Tengah,
13. Kalimantan Selatan,
14. Kalimantan Timur,
15. Sulawesi Utara,
16. Sulawesi Tenggara,
17. Sulawesi Selatan
18. Nusa Tenggara Timur (NTT),
19. Nusa Tenggara Barat (NTB), dan
20. Papua.

B. Persyaratan Umum:

1. Perguruan Tinggi khususnya Program Studi Ilmu Hukum seluruh Indonesia
2. Memiliki Pengalaman melakukan pelaksanaan penelitian lapangan terkait dengan Survei minimal lingkup kota/kabupaten
3. Memiliki Komitmen yang tinggi terkait keberhasilan penyelesaian pelaksanaan Kegiatan Survei Pengukuran Integritas Hakim dan Survei Persepsi Publik terhadap Integritas Hakim tepat waktu.

Pagu Anggaran

Pembiayaan dari DIPA Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA - 100.01.1.439479/2022 tanggal 17 Nopember 2021 dengan dengan Pagu Anggaran yang secara keseluruhan di tanggung oleh Komisi Yudisial RI dengan dilaksanakan secara penuh yang dilakukan dalam bentuk mekanisme SPK (Surat Perintah Kerja) antara Komisi Yudisial RI dengan Fakultas Ilmu Hukum yang terpilih.

Tahapan Kegiatan:

1. Tahap Pengiriman Dokuman Surat Kesanggupan Kerjasama yang ditujukan kepada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI dan dilengkapi lampiran Rencana Kerja dan Susunan Tim Pelaksana di perpanjang paling lambat 31 Agustus 2022. Softcopy Dokumen Persyaratan bisa di kirim email ke aranpanji@komisiyudisial.go.id
2. Dokumen persyaratan Legalitas, Rencana Kerja (Tahap Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan) , RAB dan Nama Tim yang terlibat.
3. Tahap Penilaian Administrasi Dokumen 31 Agustus – 2 September 2022
4. Tahap Pengumuman Pemilihan Pelaksana 5 September 2022

Ketentuan Umum:

1. Panitia tidak memunggut biaya apapun selama proses pelaksanaan kegiatan ini
2. Hanya Perguruan Tinggi yang memiliki kualifikasi dan lolos penilaian administrasi dokumen yang akan dipanggil untuk melaksanakan kegiatan survei.
3. Perguruan Tinggi yang terpilih bersedia mengikuti dan mematuhi seluruh tahapan pelaksanaan.
4. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Kepala Biro Perencanaan
Dan Kepatuhan Internal,

R. Adha Pamekas

Informasi dan Konfimasi :

Aran Panji Jaya (Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal) : 089639988404

LAMPIRAN :

LAMPIRAN :

1. JUMLAH SAMPLE HAKIM, PAKAR DAN MASYARAKAT

JUMLAH SAMPLE SURVEI					
NO		PROPINSI	TOTAL HAKIM	MASYARAKAT	PAKAR
1		ACEH	47	38	8
2		SUMATERA UTARA	59	105	22
3		SUMATERA BARAT	40	41	9
4		RIAU	44	46	10
5		JAMBI	28	26	6
6		SUMATERA SELATAN	33	61	13
7		DKI JAKARTA + MA	63	80	16
8		JAWA TENGAH			
	a.	JAWA TENGAH 1	80	200	52
	b.	JAWA TENGAH 2	27	74	0
9		JAWA TIMUR			
	a.	JAWA TIMUR 1	90	190	59
	b.	JAWA TIMUR 2	27	120	0
10		DI YOGYAKARTA	29	29	6
11		KALIMANTAN BARAT	25	40	8
12		KALIMANTAN TENGAH	26	20	4
13		KALIMANTAN SELATAN	37	30	6
14		KALIMANTAN TIMUR	32	28	6
15		SULAWESI UTARA	23	20	4
16		SULAWESI TENGGARA	23	19	4
17		SULAWESI SELATAN	70	67	14
18		NTT	31	37	8
19		PAPUA	25	31	7
20		NTB	28	38	8

2. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) YANG DI TETAPKAN

RANCANGAN ANGGARAN HPS							
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN INTEGRITAS HAKIM TA 2022							
NO		PROPINSI	TOTAL HAKIM	MASYARAKAT	PAKAR	HARGA PERKIRAAN SENDIRI	
1		ACEH	47	38	8	Rp	78,578,337
2		SUMATERA UTARA	59	105	22	Rp	133,012,732
3		SUMATERA BARAT	40	41	9	Rp	75,968,608
4		RIAU	44	46	10	Rp	87,278,186
5		JAMBI	28	26	6	Rp	57,681,331
6		SUMATERA SELATAN	33	61	13	Rp	99,988,492
7		DKI JAKARTA + MA	63	80	16	Rp	119,289,662
8		JAWA TENGAH					
	a.	JAWA TENGAH 1	80	200	52	Rp	180,946,488
	b.	JAWA TENGAH 2	27	74	0	Rp	76,764,835
9		JAWA TIMUR					
	a.	JAWA TIMUR 1	90	190	59	Rp	196,886,813
	b.	JAWA TIMUR 2	27	120	0	Rp	99,070,463
10		DI YOGYAKARTA	29	29	6	Rp	69,113,840
11		KALIMANTAN BARAT	25	40	8	Rp	59,500,472
12		KALIMANTAN TENGAH	26	20	4	Rp	52,962,616
13		KALIMANTAN SELATAN	37	30	6	Rp	68,730,388
14		KALIMANTAN TIMUR	32	28	6	Rp	77,071,596
15		SULAWESI UTARA	23	20	4	Rp	53,744,181
16		SULAWESI TENGGARA	23	19	4	Rp	53,542,305
17		SULAWESI SELATAN	70	67	14	Rp	122,810,653
18		NTT	31	37	8	Rp	76,429,878
19		PAPUA	25	31	7	Rp	58,661,389
20		NTB	28	38	8	Rp	69,590,899

3. TEMPLATE RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA

SURVEY PENGUKURAN INTEGRITAS HAKIM & PERSEPSI PUBLIK TERHADAP INTEGRITAS HAKIM

WILAYAH : (nama propinsi)

Persiapan	7 hari kalender
Pelaksanaan dan Pelaporan	23 hari kalender
Sampel	-- hakim
	-- masyarakat
	-- pakar

NO	URAIAN	PENGALAMAN (pendidikan)	Volume						Harga Satuan	TOTAL (Rp.)
A	PERSIAPAN									-
A.1	**BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL**									
1	**Belanja Operasional Kantor**									
1	Biaya ATK			pkt						
3	Biaya Fotocopy			pkt						
A.2	**Koordinasi dan Pembahasan**									
1	Pengandaan Bahan Diskusi			pkt						
2	Konsumsi									
	- makan rapat			org		kali				
	- snack rapat			org		kali				
B	PELAKSANAAN									Rp -
B.1	**BIAYA LANGSUNG PERSONIL**									
a	**Personil Utama**									
1	Koordinator Pelaksana	S2		org		bln				
2	Sekretariat	S1		org		bln				
B.2	**Personil Pendukung**									
1	Pengolah Data	S1		org		Lap				
2	Pembantu Lapangan	S1		org		hari				
3	Surveyor	min.DIII/S1		org		kali		responden		
B.3	**Perjalanan Dinas**									
1	**Uang Harian Dalam Kota**									
	a. Surveyor Hakim	S1		org		hari		kali		
	b. Surveyor Pakar	S1		org		hari		kali		
	c. Surveyor Masyarakat	min.DIII/S1		org		hari		kali		
				org		hari		kali		
2	**Uang Harian Luar Kota - Kab**			**org**		**OH**				
	a. Surveyor Hakim			org		hari		kali		
	b. Surveyor Masyarakat			org		hari		kali		
	b. Sewa Kendaraan (roda 4)					hari		kali		
C	PELAPORAN									Rp -
1	Laporan Pendahuluan			paket		kali				
2	Laporan Akhir			paket		kali				
3	Dokumentasi (Foto dan Video)			paket		kali				
				TOTAL						Rp -
									PPN	Rp -
									Pph 23	Rp -
									Jumlah Total Netto	Rp -